

**LAPORAN AKHIR TAHUN TA 2017**

**PANEL PETANI NASIONAL (PATANAS):  
ANALISIS INDIKATOR PEMBANGUNAN PERTANIAN  
DAN PERDESAAN  
PADA AGROEKOSISTEM LAHAN KERING BERBASIS  
PALAWIJA DAN SAYURAN**



**Oleh:**

**Saptana  
Tri Bastuti Purwantini  
Sunarsih  
Amar Kadar Zakaria  
Chairul Muslim  
Annisa Rika Rachmita**

**PUSAT SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2017**

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

1. Pencapaian swasembada pangan telah menjadi kebijakan dan target utama Kementerian Pertanian periode 2015-2019. Dalam kerangka menuju lumbung pangan dunia, swasembada beras, bawang merah dan cabai telah tercapai pada tahun 2016, komoditas jagung ditargetkan tahun 2017, kedelai pada tahun 2020, gula industri 2015, daging sapi 2026, Bawang Putih 2033, dan lumbung pangan dunia diharapkan tercapai pada tahun 2045 (Kementan, 2017). Potensi peningkatan kapasitas produksi pertanian pada lahan sawah semakin terbatas, pada tahun 2018 difokuskan pengembangan pertanian lahan kering.
2. Kesesuaian lahan kering untuk pengembangan pertanian pangan mencakup total luasan 148 juta ha, yang sesuai untuk budi daya pertanian sekitar 76,22 juta ha (52%). Lahan kering dataran rendah seluas 70,71 juta ha (93%) dan lahan kering dataran tinggi seluas 5,51 juta ha (7%). Pada wilayah dataran rendah, lahan datar sampai bergelombang (lereng < 15%) yang sesuai untuk pertanian tanaman pangan mencakup 23,26 juta ha. Luas lahan pertanian hasil ST tahun 2013 terdiri atas lahan sawah seluas 8,11 juta ha dan lahan kering seluas 31,36 juta ha. Luas lahan kering tersebut terdiri atas lahan tegal/kebun seluas 11,88 juta ha (37,88%), ladang/huma seluas 5,27 juta ha (16,80%), dan lahan yang sementara tidak diusahakan seluas 14,21 juta ha (45,31%) dari total lahan kering.
3. Kendala pokok pengembangan pertanian lahan kering adalah: (a) tingkat kesuburan tanah rendah dengan sumber pengairan terbatas; (b) topografi berada di daerah lereng dan perbukitan; (c) Infrastruktur ekonomi belum berkembang; (d) Keterbatasan biofisik lahan, penguasaan lahan, dan infrastruktur pendukung; dan (e) Kualitas lahan dan penerapan teknologi budi daya masih terbatas menyebabkan variabilitas produktivitas tinggi.
4. Pemerintah membutuhkan informasi indikator pembangunan ekonomi, untuk mengetahui hasil dan dampak pembangunan pertanian khususnya yang berkaitan dengan target utama berupa peningkatan produksi dan kesejahteraan petani. Dalam rangka menyediakan informasi tersebut di atas, data dan informasi yang bersifat panel menjadi sangat penting, untuk mengetahui dinamika perubahan sosial ekonomi perdesaan sebagai dampak dari pembangunan pertanian. Hasil analisis data panel yang telah dilakukan oleh PSEKP, berhasil memperlihatkan dinamika sosial ekonomi yang terjadi di perdesaan sebagai dampak dari pembangunan pertanian dan perdesaan, khususnya terkait dengan aspek penguasaan lahan, ketenagakerjaan, adopsi teknologi dan profitabilitas, pendapatan dan kesejahteraan RT, pengeluaran dan konsumsi RT, nilai tukar petani, kemiskinan dan kelembagaan pertanian di perdesaan lahan kering.
5. Upaya untuk mendorong peningkatan produksi pangan tercakup padi, palawija, dan sayuran, pemerintah pada masa lalu hingga kini lebih fokus

pada pengaturan sarana produksi berupa benih dan pupuk. Anggaran subsidi pupuk pada tahun 2010 mencapai Rp 18,4 triliun dan tetap tinggi pada tahun 2017 menjadi 19,9 triliun pada tahun 2017. Pembangunan untuk infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan irigasi relatif kurang mendapat alokasi pendanaan yang seimbang pada regim sebelumnya dan telah mendapatkan perhatian yang tinggi pada pemerintahan Kabinet Kerja. Kebijakan pemerintah pada Kabinet Kerja ini diperkirakan akan mempercepat pembangunan wilayah dan sektoral. Hasil beberapa studi menunjukkan bahwa infrastruktur jalan dan irigasi berpengaruh positif terhadap peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.

6. Pembangunan infrastruktur pada agroekosistem lahan kering tetap terbatas. Perlu *refocusing* pemerintah ke pengembangan pertanian lahan kering dalam penyediaan pangan nasional ke depan memiliki makna yang strategis. Pada tahun 2008, 2011, dan 2017 lokasi penelitian Patanas dilakukan pada lahan kering berbasis palawija dan sayuran.

### **Tujuan Penelitian**

7. Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang diperlukan untuk pembangunan perdesaan pada agroekosistem lahan kering berbasis palawija dan sayuran. Secara spesifik tujuan penelitian adalah menganalisis: (1) dinamika kondisi sosial ekonomi perdesaan, (2) dinamika struktur dan distribusi penguasaan lahan rumah tangga, (3) dinamika struktur tenaga kerja dan kesempatan kerja rumah tangga, (4) dinamika tingkat penerapan teknologi dan profitabilitas usaha tani, (5) dinamika struktur dan distribusi pendapatan rumah tangga, (6) dinamika struktur pengeluaran dan konsumsi rumah tangga petani, (7) dinamika nilai tukar pendapatan rumah tangga petani, (8) dinamika tingkat kemiskinan rumah tangga, dan (9) dinamika kelembagaan pertanian di perdesaan.

### **Metodologi**

8. Kegiatan Patanas 2017 merupakan resurvei Patanas 2011 dan Patanas 2008, maka untuk memenuhi kriteria data panel, lokasi penelitian dan rumah tangga contoh pada penelitian Patanas 2017 sama dengan lokasi dan rumah tangga contoh penelitian Patanas 2011, kecuali untuk responden meninggal atau pindah tempat tinggal dilakukan penggantian sesuai kriteria. Lokasi dan rumah tangga contoh Patanas 2011 mengacu pada penelitian Patanas 2008 dengan melakukan modifikasi untuk memenuhi kriteria contoh rumah tangga perdesaan, dan rumah tangga tahun 2017 mengacu rumah tangga 2011.
9. Penelitian Patanas 2017 dilakukan di lima provinsi sentra palawija dan sayuran, yaitu: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Selatan yang mencakup 11 kabupaten dan 12 desa contoh. Jumlah responden contoh sebanyak 32 responden per desa untuk lokasi Jawa dan 25 responden perdesa untuk lokasi Luar Jawa. Secara keseluruhan jumlah responden mencakup 363 responden rumah tangga perdesaan.
10. Jenis data yang dianalisis adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder dikumpulkan dari potensi atau profil desa dan kecamatan dalam angka. Data sekunder digunakan untuk menjawab tujuan pertama. Data

sekunder tersebut akan didukung dengan informasi yang bersumber dari *Focus on Group Discussion* (FGD) di tingkat desa dari hasil diskusi kelompok dengan aparat desa maupun tokoh-tokoh kunci di desa.

11. Data primer dikumpulkan dari rumah tangga contoh dengan kuesioner terstruktur. Data primer digunakan untuk menjawab tujuan kedua sampai dengan kesembilan. Data primer yang dikumpulkan merupakan data panel penelitian Patanas tahun 2008, 2011, dan 2017.
12. Metode analisis untuk menjawab tujuan pertama dan tujuan kesembilan adalah deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Metode analisis untuk menghitung parameter seperti tingkat penguasaan atau pemilikan lahan per rumah tangga, tingkat produktivitas tenaga kerja, tingkat pendapatan nominal/riil rumah tangga, tingkat pengeluaran nominal/riil rumah tangga, tingkat konsumsi energi dan profitabilitas usaha tani digunakan metode statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Analisis menggunakan formula sederhana dengan menghitung rata-rata (*mean*), angka maksimum (*max*), angka minimum (*min*), dan nilai tengah (*median*), gini indeks.

## **HASIL PENELITIAN**

### **Dinamika Kondisi Sosial Ekonomi**

13. Potensi sumber daya utama di 12 desa contoh Patanas lahan kering adalah dominan berupa lahan kering berupa tegalan dengan komoditas utama palawija dan sayuran. Pola tanam dominan palawija-palawija-bera dan palawija-palawija-palawija, serta sayuran-sayuran-sayuran dan sayuran-sayuran-palawija. Sumber mata pencaharian utama rumah tangga di 12 desa contoh Patanas secara berturut-turut adalah bertani dan buruh tani, usaha jasa dan pekerja jasa, serta usaha industri dan buruh industri.
14. Kondisi sarana jalan desa umumnya berupa jalan aspal/beton, jalan kerikil, dan jalan tanah, namun sebagian jalan aspal mengalami rusak. Prasarana utama adalah sepeda motor milik pribadi, ojek sepeda motor, mobil pribadi, dan angkutan umum. Angkutan umum di desa-desa contoh Patanas di Jawa kurang berkembang karena kalah bersaing dengan motor pribadi dan ojek sepeda motor, sedangkan di Luar Jawa menggunakan angkutan umum.
15. Sarana dan prasarana pertanian yang utama adalah infrastruktur jalan usaha tani, toko/kios saprodi, serta keberadaan PPL dan kelompok tani. Infrastruktur irigasi belum berkembang dengan baik dan jalan usaha tani baru sebagian kecil yang tersentuh program pemerintah. Jumlah toko/kios saprodi bervariasi 2-5 unit yang menjual benih, pupuk dan obat-obatan. Namun tidak semua kebutuhan saprodi mampu dipenuhi di dalam desa, sebagian petani membeli ke luar desa, kota kecamatan dan kota kabupaten. Petani menyatakan bahwa selama tiga tahun terakhir tidak ada fenomena kelangkaan pupuk. Jumlah dan kualitas PPL kurang memadai dengan kelompok tani aktif dan kurang aktif.
16. Infrastruktur ekonomi utama di perdesaan adalah keberadaan toko/kios/warung dan pasar desa belum berkembang. Jumlah toko/kios/warung di desa contoh lahan kering berbasis palawija bervariasi

antara 2-104 unit dan desa contoh sayuran bervariasi antara 4-22 unit. Mulai dikembangkan kelembagaan ekonomi BUMDES, namun baru mulai dibentuk keorganisasiannya dan belum berjalan secara optimal.

### **Dinamika Penguasaan Lahan**

17. Struktur penguasaan, pemilikan dan garapan rumah tangga petani pada agroekosistem lahan kering baik di desa berbasis palawija maupun sayuran menunjukkan luas penguasaan yang relatif kecil dengan dinamika mengalami kenaikan (2008-2011) dan kemudian menurun kembali (2011-2017). Pola kenaikan dan penurunan penguasaan lahan terkait dengan pola pewarisan, fragmentasi lahan, dan konsolidasi lahan.
18. Distribusi penguasaan dan garapan lahan kering bervariasi antar lokasi, di desa contoh palawija lebih merata dibandingkan pada desa sayuran. Distribusi lahan pada desa palawija relatif terdistribusi pada kelas lahan kecil dan sedang, sedangkan pada desa sayuran terpolarisasi ke kelas penguasaan lahan sedang dan luas. Lebih terpusatnya penguasaan lahan pada desa contoh sayuran disebabkan sifat sebagian komoditas sayuran yang mempunyai nilai ekonomi tinggi.
19. Ketimpangan distribusi penguasaan dan garapan lahan kering baik di desa contoh sayuran lebih tinggi dibandingkan desa palawija. Ketimpangan distribusi penguasaan lahan di desa palawija dan sayuran berada pada ketimpangan moderat. Ketimpangan distribusi pada lahan garapan baik pada desa contoh palawija maupun sayuran berada pada ketimpangan moderat hingga tinggi. Ketimpangan distribusi lahan garapan lebih tinggi di desa sayuran dibandingkan desa palawija.

### **Dinamika Penerapan Teknologi Pertanian**

20. Tingkat penerapan teknologi budi daya dan pencapaian produktivitas usaha tani pada sebagian besar palawija tergolong masih rendah-moderat dan tergolong moderat-tinggi pada sayuran. Penggunaan benih jagung hibrida sudah merata di sebagian besar lokasi basis palawija dan beberapa komoditas sayuran (kubis, kentang, cabai, sawi, petsai) di desa berbasis sayuran. Teknologi mekanisasi pertanian tidak berkembang baik di desa berbasis palawija maupun sayuran.
21. Penerapan teknologi budi daya pada usaha tani palawija di lahan kering pada periode 2008-2017 relatif stagnan atau tingkat perubahan sangat rendah, kecuali untuk komoditas jagung. Sementara itu, penerapan teknologi pada usaha tani sayuran selama kurun waktu tahun 2009 s/d 2017 tergolong sangat progresif. Faktor lambannya penerapan teknologi pada komoditas sayuran disebabkan kurangnya kegiatan penyuluhan pertanian dan rendahnya tingkat keuntungan. Tingginya penerapan teknologi pada usaha tani sayuran lebih didorong oleh keuntungan yang cukup tinggi terlebih untuk komoditas sayuran bernilai ekonomi tinggi.
22. Dari analisis kelayakan finansial usaha tani palawija dan sayuran menguntungkan dengan tingkat keuntungan yang rendah-moderat pada palawija dan moderat-tinggi pada komoditas sayuran. Dari analisis R/C ratio usaha tani palawija dan sayuran memberikan nilai R/C yang tergolong rendah-

moderat pada palawija dan moderat-tinggi pada sayuran. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengembalian modal pada usaha tani palawija tergolong rendah-moderat dan usaha tani sayuran moderat-tinggi.

### **Dinamika Tenaga Kerja dan Kesempatan Kerja Rumah Tangga**

23. Struktur tenaga kerja di perdesaan didominasi usia produktif atau berada pada piramida golongan muda, namun kualitas tenaga kerja masih relatif rendah. Nampak bahwa bonus demografi yang terjadi di perdesaan belum didayagunakan secara optimal.
24. Tingkat pendidikan angkatan kerja (AK) perdesaan terkonsentrasi pada 1-6 tahun, baik pada tahun 2008, 2011 maupun 2017, namun proporsi AK dengan tingkat pendidikan 1-6 tahun pada masing-masing desa cenderung menurun dalam tiga titik waktu tersebut, sebaliknya proporsi angkatan kerja dengan tingkat pendidikan SLP ke atas meningkat. Jika proses tersebut terus berlanjut maka diperkirakan dapat meningkatkan akses angkatan kerja ke bursa pasar kerja yang diperkirakan makin kompetitif.
25. Kesempatan kerja di desa contoh Patanas lahan kering mengalami penurunan pada periode (2008-2011), kemudian meningkat kembali pada periode (2011-2017). Beberapa faktor yang menyebabkan kesempatan kerja di desa contoh Patanas lahan kering meningkat adalah meningkatnya akses terhadap lahan melalui sistem baon dan pesanggem, terjadinya pergeseran tanaman ke arah komoditas yang lebih produktif dan memiliki nilai ekonomi lebih tinggi, pengembangan kegiatan usaha produktif yang dilakukan penduduk, meningkatnya pendidikan/keterampilan generasi muda sehingga bisa memasuki pasar tenaga kerja di luar desa, dan hal ini dipermudah dengan makin baik prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi.
26. Tingkat partisipasi kerja juga memiliki pola yang hampir serupa, yaitu cenderung menurun dalam kurun waktu 2008-2011, kemudian dalam kurun 2011-2017 cenderung sedikit meningkat. Perubahan tingkat partisipasi kerja tidak semata-mata dapat dijelaskan dengan perubahan pada ketersediaan kesempatan kerja, namun juga dipengaruhi oleh kualitas angkatan kerja untuk meraih kesempatan kerja, etos kerja, serta usia sekolah yang makin panjang dari angkatan kerja.
27. Produktivitas tenaga kerja di desa yang menjadi lokasi penelitian Patanas seluruhnya mengalami peningkatan, baik di desa berbasis palawija maupun sayuran. Perbandingan antarsektor menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja sektor nonpertanian secara umum lebih tinggi dibandingkan produktivitas tenaga kerja pertanian pada tahun 2008, namun pada dua titik waktu selanjutnya kondisi berubah dengan kecenderungan produktivitas tenaga kerja pertanian lebih rendah dibandingkan produktivitas tenaga kerja sektor nonpertanian
28. Migrasi penduduk secara sektoral terjadi dari sektor pertanian ke sektor (pertanian, industri, dan jasa), secara spasial terjadi migrasi dari desa ke (desa dan kota), secara temporal secara berturut-turut terjadi migrasi secara komutasi, sirkulasi dan permanen. Migran lebih dominan memilih migrasi secara komutasi dan sirkulasi. Faktor pendorong migrasi penduduk secara

berturut-turut adalah: (a) upah yang rendah dan tidak kontinyu, (b) pemilikan lahan yang kecil, (c) kesempatan kerja dan berusaha di desa yang tetap terbatas, (d) musim sepi kegiatan pertanian, dan (e) bekerja dipertanian oleh tenaga kerja muda dianggap kurang bergengsi. Faktor penarik migrasi tenaga kerja adalah: (a) upah di tempat tujuan lebih tinggi, (b) stabilitas pendapatan lebih terjamin, (c) memiliki kenalan atau famili ditempat tujuan, (d) fasilitas sosial ekonomi lebih tersedia, dan (e) meningkatkan status sosial keluarga.

### **Dinamika Struktur Pendapatan Rumah Tangga**

29. Sumber pendapatan rumah tangga di desa Patanas lahan kering semakin beragam dalam upaya anggota rumah tangga untuk meningkatkan kesejahteraannya. Fenomena kerja ganda terjadi di perdesaan lahan kering baik di desa contoh palawija maupun sayuran. Namun, upaya anggota rumah tangga yang berada di desa-desa Patanas yang berbasis komoditas palawija lebih memilih tambahan sumber pendapatan dari sektor nonpertanian, sedangkan pada desa sayuran tetap lebih bertumpu pada sektor pertanian.
30. Struktur pendapatan rumah tangga lahan kering masih didominasi sektor pertanian, pangsa pendapatan dari sektor pertanian di desa berbasis sayur lebih tinggi jika dibandingkan di desa berbasis palawija. Struktur pendapatan pertanian pada lahan kering didominasi dari usaha tani komoditas basis, namun beberapa lokasi dimana komoditas basis tergeser atau bahkan ditinggalkan petani bersumber pada komoditas alternatif yang lebih menguntungkan.
31. Terdapat ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat di perdesaan baik di desa palawija maupun sayuran. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan berada pada ketimpangan rendah-moderat, sedangkan pada desa sayuran berada pada ketimpangan rendah-berat. Faktor penyebab perbedaan ketimpangan adalah perbedaan ketimpangan penguasaan lahan, serta perbedaan nilai ekonomi komoditas yang diusahakan.

### **Dinamika Kemiskinan Rumah tangga**

32. Tingkat kemiskinan rumah tangga di perdesaan agroekosistem lahan kering rata-rata menurun selama 2008-2011, namun pada kurun waktu 2011-2017 jumlah insiden kemiskinan meningkat, peningkatan pendapatan tidak selalu dapat mengentaskan kemiskinan, karena penyebab kemiskinan tidak hanya karena rendahnya pendapatan, namun faktor kenaikan tingkat inflasi dan faktor sosial budaya juga turut berpengaruh. Disisi lain kedalaman dan keparahan kemiskinan, ini megindikasikan bahwa kesenjangan diantara penduduk miskin semakin menyempit.
33. Penggunaan Dana Desa belum efektif menekan insiden kemiskinan di desa agroekosistem lahan kering. Penggunaan Dana Desa masih fokus pada pembangunan infrastruktur (bangun/renovasi gedung, perbaikan jalan desa, jalan usaha tani, jembatan) yang tidak langsung berdampak pada pengentasan kemiskinan, sementara program pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan masih kurang.

### **Dinamika Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga**

34. Terjadi penurunan konsumsi pangan sumber karbohidrat dari beras dan sebaliknya konsumsi mie instan cenderung meningkat. Hingga kini belum terjadi penurunan pangsa pengeluaran pangan, justru arah perubahannya semakin meningkat (2011-2017). Peningkatan pendapatan masih digunakan sebagian untuk konsumsi pangan yang mengarah ke pangan yang bernilai tinggi. Pangsa pengeluaran pangan masih dominan untuk pangan sumber karbohidrat.
35. Tingkat konsumsi energi masih dibawah standar angka kecukupan gizi. Tingkat konsumsi protein sudah mencapai standar kecukupan protein, namun konsumsi sumber protein tersebut masih didominasi protein nabati. Peningkatan konsumsi protein hewani dapat dilakukan dengan pengembangan unggas lokal, kolam ikan, peningkatan pendapatan, dan pendidikan gizi keluarga.

### **Dinamika Nilai Tukar Petani**

36. NTPRTP dipengaruhi oleh keragaman tingkat pengeluaran rumah tangga dan harga jual output yang dihasilkan petani. Proporsi pengeluaran rumah tangga terbesar adalah biaya produksi dan biaya konsumsi. Dinamika NTPRTP juga sangat dipengaruhi dinamika tingkat produktivitas hasil dan harga jual hasil pertanian yang diterima petani.
37. Secara rata-rata NTPRTP pada desa contoh lahan kering berbasis sayuran lebih tinggi jika dibandingkan desa contoh palawija. Namun NTPRTP pada desa contoh lahan kering berbasis sayuran memiliki fluktuasi yang lebih tinggi jika dibandingkan desa contoh berbasis palawija.

### **Dinamika Kelembagaan Pertanian**

38. Kelembagaan lahan baik sistem sewa, bagi hasil, dan gadai umumnya tidak dilakukan secara tertulis, namun lebih didasarkan atas saling kepercayaan. Dengan munculnya fenomena cidera janji dan perkembangan teknologi maka ke depan kelembagaan lahan perlu dilakukan secara tertulis. Sistem sewa, bagi hasil dan gadai cenderung menurun pada desa berbasis palawija dan cenderung stabil pada desa berbasis sayuran. Sistem bagi hasil dijumpai baik di desa palawija maupun sayuran. Sistem sewa lebih banyak ditemukan di desa lahan kering berbasis sayuran, sedangkan sistem gadai semakin berkurang baik di desa palawija maupun sayuran.
39. Kelembagaan hubungan kerja bergeser tetap didominasi pola hubungan kerja hubungan kerja buruh lepas. Kelembagaan hubungan kerja dengan sistem langganan masih ditemukan pada desa berbasis sayuran terutama petani lahan luas yang mengusahakan tanaman sayuran bernilai ekonomi tinggi. Pola hubungan kerja permanen mengalami penurunan dan cenderung menghilang baik di desa lahan kering palawija maupun sayuran. Sistem pengupahan tetap didominasi sistem upah harian, sistem upah borongan ditemukan pada kegiatan dan komoditas tertentu.
40. Keterbatasan modal merupakan salah satu masalah pokok yang dihadapi oleh petani dalam penerapan teknologi dan akses input produksi, sehingga petani

cenderung menggunakan modal sendiri seadanya, meminjam kepada lembaga keuangan nonformal (pedagang sarana produksi, pedagang hasil, dan sesama petani), sedangkan sumber kredit dari lembaga keuangan formal masih terbatas, kecuali untuk petani lahan luas yang mengusahakan komoditas sayuran bernilai ekonomi tinggi.

41. Pola pemasaran hasil palawija dan sayuran bersifat spesifik lokasi, secara umum hasil pertanian palawija dan sayuran dijual kepada pedagang pengumpul desa/antardesa atau pemborong/penebas, industri pengolahan hasil, pedagang besar antar daerah. Sistem pembayaran sebagian besar dilakukan secara tunai, sistem borongan/tebasan untuk komoditas tertentu dibayar dengan bayar panjar terlebih dahulu.
42. Kelembagaan penyuluhan pertanian yang dijalankan oleh Penyuluh Pertanian Lapang (PPL) memiliki peranan penting untuk mempercepat proses alih teknologi maju kepada petani, namun peranan tersebut belum berlangsung secara optimal akibat kurangnya jumlah dan kualitas PPL, serta kurang intensifnya interaksi antara PPL dan petani. Petani palawija lebih banyak belajar dari sesama petani, sedangkan petani sayuran lebih mengandalkan sumber informasi teknologi dari petani maju dan dari penyuluh swasta.

#### **IMPLIKASI KEBIJAKAN**

43. Kebijakan terkait kondisi sarana jalan desa yang banyak mengalami kerusakan adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan dana alokasi desa yang dilakukan secara swakelola masyarakat desa. Perlu pengembangan moda transportasi angkutan umum yang nyaman dan aman sehingga masyarakat desa lahan kering mau mememanfaatkannya.
44. Kebijakan terkait sarana dan prasarana pertanian, perlu dilakukan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi spesifik lahan kering dan jalan usaha tani melalui program JITUT dan JIDES, pengembangan embung, dan pompanisasi, serta infrastruktur pascapanen dan pemasaran. Pengembangan kios/toko sarana produksi yang mampu menyediakan sarana produksi yang memenuhi enam tepat.
45. Kebijakan terkait sumber mata pencaharian rumah tangga, maka perlu peningkatan kapasitas produksi pertanian, peningkatan optimalisasi pemanfaatan lahan kering tegalan, peningkatan intensitas tanam, pengembangan komoditas palawija dan sayuran yang memberikan menguntungkan; serta pengembangan usaha nonpertanian berbahan baku setempat (pakan ternak, peternakan unggas komersial, industri berbasis kacang tanah dan kedelai), pengembangan usaha nonpertanian (industri, perdagangan, dan jasa), dan kegiatan buruh nonpertanian dan jasa
46. Pembangunan ekonomi yang mengarah pada tahap transformasi dari sektor pertanian ke industri menuntut penggunaan lahan pertanian untuk pembangunan sektor industri, jasa, dan perumahan. Cukup tingginya laju alih fungsi lahan kering tegalan untuk keperluan nonpertanian berimplikasi pada penguasaan lahan pertanian yang semakin mengecil dan terus mengecil, maka strategi perluasan pertanian lahan kering pertanian ke depan adalah

melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pada MK-I dan MK-II dengan dukungan irigasi lahan kering.

47. Dalam kondisi penguasaan lahan kering tegalan berbasis palawija dan sayuran yang kecil, upaya yang perlu mendapat prioritas adalah melakukan konsolidasi lahan dengan menata kembali agar lahan dapat digunakan secara lebih efisien, menghindari fragmentasi lahan, melakukan usaha tani komoditas basis melalui pendekatan Cooperative Farming. Program redistribusi lahan melalui Land reform perlu terus dilakukan dengan memperhatikan pemanfaatan lahan yang didasarkan atas kearifan lokal.
48. Perlu adanya Undang-Undang yang mengatur mekanisme transfer penguasaan lahan garapan melalui sistem sewa, bagi hasil, dan gadai yang adil dan dapat melindungi kepentingan petani penggarap.
49. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM atau tenaga kerja dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas tenaga kerja di perdesaan agar AK di perdesaan dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan teknis, dan kapabilitas manajerialnya, sehingga dapat mengakses pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif baik pertanian maupun nonpertanian.
50. Upaya untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja maka diperlukan kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja baik untuk kegiatan pertanian maupun nonpertanian, pengembangan kapasitas produksi pertanian dengan penggunaan teknologi maju, mekanisasi pertanian spesifik lahan kering, dan kebijakan harga input dan output secara tepat. Perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan usaha ekonomi produktif di perdesaan khususnya industri pengolahan berbasis palawija dan sayuran, serta usaha jasa.
51. Kebijakan penting terkait migrasi tenaga kerja adalah membekali tenaga kerja perdesaan baik dari aspek pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan, sehingga keterampilan teknis maupun kapabilitas manajerialnya dapat ditingkatkan, sehingga mendapatkan pekerjaan yang layak tempat tujuan migrasi.
52. Dalam rangka meningkatkan produktivitas dan produksi palawija dan sayuran, serta pendapatan petani maka berbagai upaya penerapan paket teknologi maju perlu terus dilakukan. Introduksi teknologi usaha tani palawija dan sayuran yang berspesifik lokasi dapat dilakukan dengan penyebarluasan varietas unggul baik benih hibrida maupun in hibrida, serta penggunaan varietas yang seragam dalam satu hamparan, penerapan teknologi Pengelolaan Sumber Daya Terpadu (PTT), introduksi teknologi mekanisasi pertanian spesifik lahan kering, suplesi air irigasi melalui pompanisasi/embung/pipanisasi dan sprinkle, kegiatan pemeliharaan, serta kegiatan panen dan pasca panen yang dapat meningkatkan produktivitas dan menekan kehilangan hasil palawija dan sayuran.
53. Untuk menjaga tingkat profitabilitas usaha tani palawija dan sayuran maka kebijakan pemerintah terutama terkait subsidi input (benih dan pupuk) dan penerapan HPP penerapannya perlu diperluas ke kelompok komoditas palawija

dan sayuran dengan melakukan penyempurnaan dan mempertimbangkan keuntungan layak bagi petani.

54. Upaya meningkatkan pendapatan dari kegiatan pertanian diperlukan dukungan teknologi, infrastruktur pertanian spesifik lahan kering, serta kebijakan harga input dan output yang memberikan insentif bagi petani. Diperlukan upaya memperluas kesempatan kerja pada kegiatan non-pertanian melalui pengembangan agroindustri, pengembangan industri pakan ternak di sentra produksi jagung, industri tepung tapioka di daerah sentra produksi ubikayu, industri keripik pada daerah sentra produksi kentang, industri (tepung cabai, sause dan sambal) pada daerah sentra produksi cabai, serta promosi produk unggulan palawija dan sayuran.
55. Adanya kecenderungan ketimpangan pendapatan antargolongan masyarakat di perdesaan lahan kering berbasis palawija dan sayuran, maka dapat diatasi dengan pemberdayaan ekonomi produktif untuk kelompok masyarakat miskin, mengembangkan kelembagaan hubungan kerja yang adil, dan membangun kemitraan usaha agribisnis secara terpadu.
56. Pada beberapa lokasi contoh lahan kering palawija umumnya rumah tangga memiliki lahan pekarangan yang cukup luas, sedangkan di desa sayuran sudah sangat terbatas. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan untuk budi daya tanaman pangan, sayur dan buah, serta ternak dan ikan dapat mendukung ketahanan pangan dan kedaulatan pangan rumah tangga.
57. Kebijakan dan program pemerintah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan NTPRTP pada desa lahan kering berbasis palawija dan sayuran adalah melalui peningkatan produktivitas hasil pertanian, pengaturan pola konsumsi rumah tangga, dan kebijakan stabilisasi harga output, terlebih untuk komoditas sayuran. Upaya peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui peningkatan skala usaha tani, penerapan teknologi maju, dan dukungan infrastruktur pertanian, serta peningkatan kualitas SDM petani.
58. Kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan pada desa lahan kering palawija dan sayuran harus dilakukan berbasis spesifik wilayah dan berbasis komoditas unggulan dengan memperhatikan keragaman sumber daya alam dan kelompok masyarakat miskin. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM kelompok miskin, penguasaan teknologi tepat guna, bantuan permodalan, penguatan kelembagaan di tingkat lokal yang menyentuh kelompok miskin, dan pemberian program bantuan tepat sasaran.
59. Kondisi kemiskinan rumah tangga bersifat dinamis dan biasanya sangat rentan terhadap fluktuasi pendapatan rumah tangga dan kenaikan harga-harga barang umum atau inflasi. Penyempurnaan dan pembaruan data kemiskinan dan klarifikasi kepada aparat dan tokoh masyarakat setempat, diharapkan dapat membantu meningkatkan ketepatan kelompok sasaran.
60. Kebijakan dan program untuk mengurangi kemiskinan pada lahan kering harus dilakukan spesifik lahan kering dan berbasis komoditas unggulan spesifik lokasi dengan memperhatikan keragaman sumber daya alam dan kelompok masyarakat miskin. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas SDM kelompok miskin, penguasaan teknologi tepat

guna, bantuan permodalan dengan bunga lunak, penguatan kelembagaan lokal, meningkatkan peran local championship dalam pemberdayaan kelompok miskin, dan pemberian program pembangunan pertanian spesifik lahan kering yang tepat sasaran.

61. Penggunaan alokasi dana desa yang telah digulirkan sebagian harus diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat dengan tujuan untuk menekan kemiskinan di perdesaan. Program yang dapat disarankan adalah pemberdayaan ekonomi produktif pada kelompok wanita dan pemuda tani, berupa pengembangan ekonomi kreatif, seperti pemanfaatan lahan pekarangan, pengolahan hasil pertanian, pemasaran hasil pertanian on line, koperasi wanita tani dan pemuda tani.
62. Upaya terkait dengan masalah kelembagaan lahan baik itu sistem sewa-menyewa, sakap-menyakap, maupun sistem gadai dapat dilakukan dengan mendorong penggunaan sistem kontrak secara tertulis yang didalamnya memuat tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang tercakup, sehingga dapat dihindari fenomena cidera janji dan menjamin kepastian usaha.
63. Kelembagaan hubungan kerja yang didominasi sistem hubungan kerja lepas dengan sistem upah harian, yang diikuti dengan sistem hubungan kerja tetap dengan upah yang sedikit lebih rendah. Ke depan perlu dirumuskan Upah Minimum Regional (UMR) khusus untuk usaha pertanian dengan melibatkan buruh tani, pemilik lahan luas, serta pemerintah desa atau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
64. Upaya mengatasi masalah permodalan maka perlu dikembangkan lembaga keuangan mikro yang mudah diakses petani dan dengan suku bunga rendah. Selain itu, program sertifikasi lahan dapat meningkatkan akses petani lahan kering terhadap sumber keuangan formal baik lembaga perbankan maupun lembaga nonbank.
65. Upaya mengatasi kekurangan jumlah dan kualitas penyuluh pertanian lapang (PPL) dapat dilakukan dengan: (a) tetap mempertahankan tenaga penyuluh pertanian lapang yang berstatus Tenaga Harian Lepas (THL); (b) melakukan seleksi terhadap tenaga PPL-THL yang kompeten untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil; (c) pemberdayaan petani maju yang berpengalaman yang diposisikan sebagai "penyuluh swadaya"; dan (d) pemberdayaan dan pengaturan penyuluh swasta yang lebih berorientasi bisnis untuk bersinergi dengan PPL dan Penyuluh Swadaya agar berbagi pengalaman dan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.
66. Pemasaran hasil pertanian berbasis palawija dan sayuran sebagian besar dijual ke pedagang pengumpul desa atau antardesa, sebagian ada yang jual secara tebasan (kasus kubis) baik ke pedagang pengumpul desa maupun antardesa, dan hanya sebagian kecil yang dijual langsung ke pasar atau ke Sub Terminal Agribisnis (STA). Ke depan perlu dikembangkan pola pemasaran hasil pertanian alternatif, dapat melalui pola penjualan ke STA, Sistem Resi Gudang, pengembangan BUMDES, serta penjualan melalui Toko Tani Indonesia (TTI) dan Rumah Pangan Kita (RPK).